



Analisis Pendapatan Nasional: Kota Jakarta

Dedek Kustiawati¹, Anisa², Ersita Afiah Utami³, Najmina Khoirunnisa⁴

UIN Syarif Hidayatullah

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Submit 07 January 2023

Accepted 18 January 2023

Published 20 January 2023

Email Author:

dedek.kustiawati@uinjkt.ac.id,

anisa.khrn19@mhs.uinjkt.ac.id

ersita.utami19@mhs.uinjkt.ac.id

najmina.khoirunnisa19@mhs.uinjkt.ac.id

ABSTRACT

This paper aims to determine the gross national income and economic growth in the capital, namely the city of Jakarta. This study uses a quantitative approach. This study also identifies the impact of the corona virus that has occurred for two years on the gross national income of the City of Jakarta. The results of the study show that the gross national income of the City of Jakarta has grown quite significantly from year to year. Despite the Corona outbreak and with the increase in the census of the poor and the population of the City of Jakarta, this is not a barrier to increasing the amount of the Regional Budget for the City of Jakarta. Regional revenues for the City of Jakarta have grown significantly from year to year. Pemprov DKI Jakarta must continue to work hard to stabilize and further improve the safety level of the City of Jakarta PPE for the remainder of the year while continuing to consider what, if anything, has the potential to undermine this upward trend. Therefore, accelerating PPE in Jakarta will have a negative impact on economic growth and the local population's sense of security.

Keyword– National Income, Growth, Finance, Regional Revenue Budget

ABSTRAK

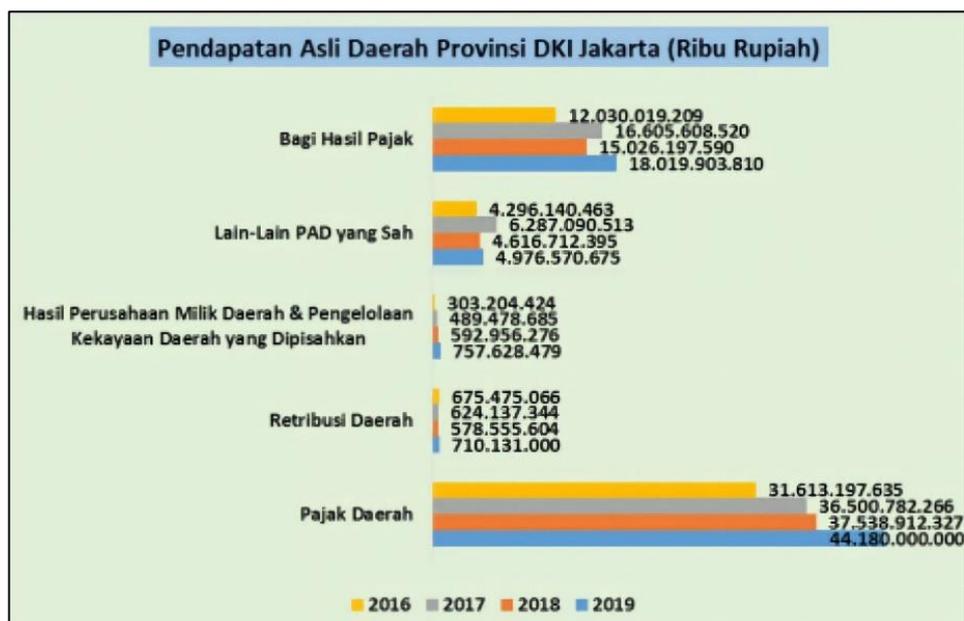
Artikel ini bertujuan untuk menentukan pendapatan nasional bruto dan pertumbuhan ekonomi di ibukota, yaitu kota Jakarta. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Studi ini juga mengidentifikasi dampak virus Corona yang telah terjadi selama dua tahun pada pendapatan nasional bruto kota Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan nasional bruto kota Jakarta telah tumbuh cukup signifikan dari tahun ke tahun. Terlepas dari wabah korona dan dengan peningkatan sensus orang miskin dan populasi kota Jakarta, ini bukan penghalang untuk meningkatkan jumlah anggaran regional untuk kota Jakarta. Pendapatan daerah Kota

Jakarta mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahunnya. Pemprov DKI Jakarta harus terus bekerja keras untuk menstabilkan dan lebih meningkatkan tingkat keselamatan APD Kota Jakarta untuk sisa tahun ini dengan terus mempertimbangkan apa, jika ada, yang berpotensi merusak tren kenaikan ini. Oleh karena itu, percepatan APD di Jakarta akan berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi dan rasa aman penduduk setempat..

Kata Kunci – Pendapatan Nasional, Pertumbuhan, Keuangan, Anggaran Pendapatan daerah

PENDAHULUAN

Jakarta merupakan Ibu kota Indonesia yang dikenal dengan keberagaman budayanya, kota ini juga merupakan kota terbesar di Indonesia (Tirtosudarmo, 2022). Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu bagian hal terpenting dalam suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri menjadi salah satu bagian dalam pembangunan makro ekonomi suatu negara, dengan ini akan jelas berapa pendapatan negara tersebut (Muttaqin, 2018). Ekspor dan impor adalah salah satu contoh variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ini dalam bidang perdagangan. Model Klasik menjelaskan bahwa permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar barang maupun jasa akan berpengaruh terhadap output perekonomian suatu negara (Purba, 2020). Adam Smith menjelaskan di dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* bahwa pertumbuhan ekonomi bertumpu pada adanya pertumbuhan penduduk sehingga dengan adanya pertumbuhan penduduk maka akan terdapat penambahan output dan pertambahan hasil (Andinata et al., 2020).



Gambar 1 Sumber: statistik.jakarta.go.id

Dari data di atas bisa disimpulkan bahwa pendapatan pada Negara Indonesia tepatnya pada Kota Jakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun berdasarkan jenis pendapatan daerahnya. Setiap negara dan daerah tentunya memiliki pendapatan yang sudah pasti berbeda-beda, karena dari modal, produktivitas, maupun tenaga kerja pun satu negara berbeda dengan negara yang lain. Untuk

menilai kondisi perekonomian negara tersebut bisa dilihat dari pertumbuhan perekonomian itu sendiri, baik di negara maju maupun negara berkembang (Sahban, 2018). Pendapatan suatu Negara adalah sebagai tolak ukur yang digunakan untuk menghitung perekonomian negara untuk memperoleh informasi tentang perekonomian yang sudah dicapai serta nilai pengeluaran produksi. Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk menilai tingkat kemajuan dan perkembangan suatu Negara (Pramono, 2014).

Krisis ekonomi saat ini merupakan masalah ekonomi tingkat panjang. Untuk menunjukkan apakah pertumbuhan atau ketidakstabilan ekonomi terjadi di negara tertentu, indikator ekonomi digunakan (Amrillah, 2016). Pertumbuhan ekonomi adalah satu-satunya tujuan terpenting dari ekonomi mana pun yang dapat secara efektif memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka semakin tinggi pula kemampuan negara tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, sehingga semakin tinggi pula kemampuan negara tersebut untuk mensejahterakan masyarakat (Sudarsana, 2015). Pertumbuhan ekonomi menimbulkan dua dampak penting, yaitu (1) kemakmuran atau taraf hidup masyarakat meningkat, (2) menciptakan lapangan kerja bagi peningkatan jumlah penduduk (Sukirno, 2006:421) dalam (Nahumuri, 2019)

METODE

Penulis menggunakan metode kuantitatif dalam melakukan analisis pendapatan nasional ini, dimana metode ini memerlukan angka atau data untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang ingin penulis ketahui. Pada proses analisis ini diperlukan angka dan data untuk hasil perhitungan serta pendapatan sehingga penulis memilih metode kuantitatif. Penulis mengumpulkan data, menganalisa, serta melakukan perhitungan dan menarik kesimpulan dari apa yang telah dianalisis tentang bagaimana pendapatan di Kota Jakarta. Penulis mencari sumber-sumber yang kredibel untuk mengetahui pendapatan Kota Jakarta. Oleh karena itu, data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dari pihak kedua. Pada pemrosesan selanjutnya, penulis meneliti data dari data yang telah diperoleh dengan mengamati apakah data itu mengalami kenaikan atau penurunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, pada pendapatan daerah kota Jakarta tahun anggaran 2022 terdapat 3 faktor utama dalam komposisi pendapatan daerah, diantaranya 1) Pendapatan asli daerah (PAD), 2) Belanja daerah, dan 3) Pembiayaan daerah yang berupa penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Sehingga kesimpulan yang didapat bahwa pada faktor pertama yaitu pendapatan asli daerah dengan beberapa faktor lainnya berjumlah 77,4 triliun. Pada faktor kedua yaitu belanja daerah dengan beberapa pengaruh faktor lainnya seperti belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga berjumlah 75,7 triliun. Dan sedangkan pada faktor utama ketiga yaitu pembiayaan daerah dengan rincian penerimaan pembiayaan sejumlah 5 triliun dan pengeluaran pembiayaan sejumlah 6,7 triliun. Dari perincian tersebut dapat disimpulkan bahwa total APBD pada kota Jakarta tahun anggaran 2022 berjumlah 82,4 triliun.

Dikutip dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, Pemprov DKI Jakarta menyatakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebanyak 100,55% atau setara Rp65,57 triliun. Jumlah ini melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp 65,21 triliun dengan rincian diantaranya 1) pendapatan asli daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp 41,61 triliun atau 92,09% dari target Rp45,18 triliun 2)

Belanja daerah tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar, Rp69,99 triliun dan transaksi sebesar Rp.61,62 triliun. Sedangkan untuk faktor 3) Pembiayaan Daerah tidak terdapat perinciannya. Jika dibandingkan total APBD Kota Jakarta tahun 2021 sebesar 65,57 triliun terhadap APBD Kota Jakarta tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan dengan total APBD sebesar 82,4 triliun.

Walaupun total APBD Kota DKI Jakarta mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, faktor lain pun akan mempengaruhinya salah satunya sensus kependudukan yang ada di Kota Jakarta. Dilihat dari data Statistik Jakarta terdapat bahwa sensus penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta per Maret 2022 sebesar 502,04 ribu jiwa dengan jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta dari hasil SP 2020 sebesar 10,56 juta jiwa. Maka dari itu, Pemprov DKI Jakarta tetap harus berupaya keras dalam menjaga kestabilan APBD Kota Jakarta terlebih dalam meningkatkan lebih baik lagi dengan tetap memperhatikan beberapa hal utama dalam komposisi yang ada pada pendapatan daerah.

Table 1. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ringkasan Apbd Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
4	Pendapatan Daerah	
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	55.658.635.618.592
4.1.01	Pajak Daerah	45.700.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	806.878.300.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	793.735.537.821
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.358.021.780.771
4.2	Pendapatan Transfer	16.882.866.000.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	16.882.866.000.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.907.212.270.908
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.907.212.270.908
4.3.02	Dana Darurat	0
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
	Jumlah Pendapatan	77.448.713.889.500
5	Belanja Daerah	
5.1	Belanja Operasi	59.207.770.697.899
5.1.01	Belanja Pegawai	19.330.438.904.761
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	25.394.540.761.521
5.1.03	Belanja Bunga	789.540.302.919
5.1.04	Belanja Subsidi	5.596.362.775.262
5.1.05	Belanja Hibah	2.901.940.662.700
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.194.947.290.736
5.2	Belanja Modal	12.923.227.066.306
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.846.183.527.835
5.2.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	2.268.392.094.035
5.2.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	2.731.768.163.822

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	4.931.757.785.509
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	144.524.376.414
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	601.073.691
5.3	Belanja Tidak Terduga	3.146.481.644.879
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.146.481.644.879
5.4	Belanja Transfer	479.775.389.250
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	479.775.389.250
	Jumlah Belanja	75.757.234.798.334
	Total Surplus/Defisit	1.691.479.091.166
6	Pembiayaan daerah	
6.1	Penerimaan pembiayaan	5.022.420.964.799
6.1.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	4.035.856.630.001
6.1.02	Penerimaan pinjaman daerah	986.564.334.798
	Jumlah penerimaan pembiayaan	5.022.420.964.799
6.2	Pengeluaran pembiayaan	6.713.900.055.965
6.2.02	Penyertaan modal daerah	5.535.964.934.677
6.2.03	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	927.935.121.288
6.2.04	Pemberian pinjaman daerah	250.000.000.000
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	6.713.900.055.965
	Pembiayaan netto	(1.691.479.091.166)
	Total APBD	82.471.134.854.299

SIMPULAN

Pendapatan daerah Kota Jakarta mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahunnya. Walaupun dengan adanya wabah virus corona dan sensus penduduk miskin dan jumlah penduduk Kota Jakarta yang tinggal terus meningkat tiap tahunnya, hal tersebut bukan penghalang dalam peningkatan jumlah Anggaran Pendapatan Daerah (APD) Kota Jakarta. Namun, Pemprov DKI Jakarta tetap harus bekerja keras dalam upaya menstabilkan terlebih meningkatkan APD Kota Jakarta menjadi lebih baik untuk tahun kedepannya dengan terus memperhatikan hal apa saja yang dapat mempengaruhi peningkatan tersebut. Sebab, dengan adanya peningkatan APD di Kota Jakarta maka akan berpengaruh pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan penduduk Kota Jakarta..

BIBLIOGRAFI

- Amrillah, M. F. (2016). Pengaruh Nilai Tukar Rupiah (Kurs), Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2008-2014. *VALUTA*, 2(2), 232–250.
- Andinata, C. P., Adenan, M., & Jumiati, A. (2020). Analisis Pendapatan Nasional di Negara-negara Anggota ASEAN. *Jurnal Ekuilibrium*, 2(1), 31–44.
- Badan Pusat Statistik. 2020. “Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2019”. <https://statistik.jakarta.go.id/statistik-keuangan-pemerintah-provinsi-dki-jakarta-tahun-2016-2019/>
- Badan Pusat Staistik. 2020. “Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menurut Jenis

- Pendapatan (ribu rupiah) 2018-2020”.
<https://jakarta.bps.go.id/indicator/101/730/1/realisasi-pendapatan-pemerintah-provinsi-dki-jakarta-menurut-jenis-pendapatan-ribu-rupee-.html>
- Badan Pemeriksaan Keuangan RI. 2022. “Pendapatan Daerah DKI Jakarta Tahun 2021 Terealisasi 100.55%”
<https://jakarta.bpk.go.id/ariza-pendapatan-daerah-dki-jakarta-tahun-2021-teralisasi-10055/>
- Muttaqin, R. (2018). Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. *Maro*, 1(2), 117–122.
- Nahumuri, L. L. (2019). Esensi Dan Urgensi Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 4(1), 1–12.
- Pramono, J. (2014). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti*, 7(1).
- Purba, B. (2020). Analisis Tentang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2009–2018. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 4(2), 244–255.
- Sahban, M. A., & SE, M. M. (2018). *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang* (Vol. 1). Sah Media.
- Sudarsana, I. K. (2015). Peningkatan mutu pendidikan luar sekolah dalam upayapembangunan sumber daya manusia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 1(1), 1–14.
- Tirtosudarmo, R. (2022). *Mencari Indonesia 1: Demografi-Politik Pasca-Soeharto (BW)*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Copyright holder:

Dedek Kustiawati, Anisa, Ersita Afiyah Utami, Najmina Khoirunnisa (2023)

First publication right:

ETNIK : Jurnal Ekonomi dan Teknik